

ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI INDONESIA

Latif Adam dan Siwage Dharma Negara
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

The Free trade agreement between ASEAN and China will have a significant impact on the Indonesian economy. Many observers predicted that Indonesia will be flooded by cheap import products from China after the implementation of ACFTA. This in turn will worsen Indonesia's trade deficit against China. Fear about the negative impacts of ACFTA were raised by most businessmen, citing about various obstacles that detriment their competitiveness including lack of infrastructure, cumbersome bureaucracy, poor law enforcement, corruption, etc. Inevitably, the implementation of ACFTA without sufficient support from the government will put the local industry and small businesses at risk of bankruptcy. There is also prediction that Indonesia will become more dependent on export of natural resources and agricultural based product groups, such as oil and gas, coal, palm oil, and rubber. On the contrary, many manufacturing industries, including textile, garment, electronics, food, steel/iron, and horticultural products, are predicted to be negatively affected by the implementation of ACFTA. This paper discusses about the challenges and opportunities faced by Indonesia in the wake of ACFTA implementation. The main message is that Indonesia needs to put more serious efforts in order to become a leveled trade partner with China. Indonesia needs to improve its technological and managerial capabilities and try to connect itself into global production network, in which China becomes the system integrator.

consciousness.

Keywords: ACFTA, neraca perdagangan, ekspor impor, daya saing

PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir ditandai dengan perubahan peta kekuatan ekonomi dunia. China muncul sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia di mana sumbangan negara ini dalam *output* global naik dari 1,3% pada tahun 1990 menjadi 7,3% pada

tahun 2008 (World Bank 2009). Pertumbuhan ekonomi China yang begitu pesat selama dua dasawarsa terakhir memunculkan sejumlah tantangan dan kesempatan bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Negara-negara ASEAN menyadari bahwa mereka tidak dapat menghindari persaingan dengan China di berbagai segmen mulai dari sektor manufaktur hingga investasi. China merupakan pesaing yang sangat berat karena kebijakan nilai tukarnya yang membuat produk-produk China menjadi luar biasa murah. Di samping itu China juga diuntungkan oleh adanya skala ekonomis (*economies of scale*) yang sangat besar karena pasar domestiknya yang besar.

ASEAN mencoba menghadapi ancaman China dengan mencetuskan inisiatif pembentukan kawasan ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang menurut rencana akan mulai diterapkan pada tahun 2015. Sebenarnya, hubungan ekonomi antara China dan ASEAN tidaklah sepenuhnya bersifat hubungan persaingan. Dalam banyak hal hubungan kedua kawasan ini menunjukkan hubungan yang bersifat saling melengkapi atau komplementer (Athukorala 2008). China telah menjadi perakit utama produk-produk global. China merakit produk-produk jadi elektronik dan manufaktur lainnya dengan menggunakan komponen-komponen dan bahan baku yang berasal dari berbagai negara di kawasan ASEAN. China menjadi tujuan utama ekspor negara-negara di Asia Timur dan Tenggara. Menurut laporan ADB (2009a), pangsa produk China dalam total *output* seluruh kawasan Asia Timur dan Tenggara naik dari 31% pada tahun 1990 menjadi 59% pada tahun 2008.

Melihat pentingnya peran China dalam perekonomian global dan khususnya perekonomian Asia, ASEAN merasa perlu untuk merangkul negara ini sebagai mitra strategis dalam kerjasama ekonomi. Bagi Indonesia khususnya, paling tidak terdapat tiga peluang positif yang dikemukakan pemerintah pada saat perjanjian ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) pertama kali ditandatangani oleh Presiden Megawati di Bandar Sri Begawan, Brunei, November 2001. *Pertama*, penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan nontarif oleh China akan membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor ke negara berpenduduk terbesar di dunia. *Kedua*, penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan terbuka, membuka

peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China. Ketiga, peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas, membantu Indonesia melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*), baik dalam hal kehandalan teknologi (*technology capability*) maupun manajerial (*managerial capability*).

Namun demikian, ada beberapa indikasi yang cukup kuat bahwa pemerintah tidak mempersiapkan kondisi ekonomi nasional secara optimal untuk meraih peluang positif dari pemberlakuan ACFTA sejak Januari 2010. Hal ini tercermin antara lain dari ketidakmampuan pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing sektor industri manufaktur yang sebenarnya merupakan prasyarat utama untuk meraih manfaat dari pemberlakuan ACFTA. Buruknya kualitas infrastruktur (termasuk infrastruktur jalan, pelabuhan, transportasi, logistik, listrik dan energi), tingginya suku bunga kredit investasi dan modal kerja, panjangnya rantai birokrasi, maraknya pungutan liar serta peraturan yang tidak pro-bisnis adalah beberapa bukti kegagalan pemerintah dalam menciptakan prasyarat dasar (*necessary condition*) untuk mendorong peningkatan daya saing beragam sektor ekonomi khususnya industri manufaktur (Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School 2010).

Tanpa adanya peningkatan daya saing perekonomian, Indonesia akan terpuruk dalam kerjasama ACFTA. Sebagai contoh adalah industri besi dan baja. Implementasi ACFTA diperkirakan akan meningkatkan impor besi dan baja asal China menjadi hampir tiga kali lipat dari sebesar 554 ribu ton pada tahun 2009 menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2010 (Kementerian Perindustrian, 2010). Adanya kelebihan produksi besi baja di China ditambah dengan kebijakan penurunan bea masuk produk besi-baja asal China akan menyebabkan harga besi-baja produksi China menjadi sangat murah dibandingkan dengan produk besi-baja lokal. Ditambah lagi kebijakan pemerintah China yang memberikan fasilitas subsidi pajak (*Export Value Added Tax Rebate*) antara 9-13% di sektor besi-baja, maka hal ini dapat mematikan industri besi-baja Indonesia. Tidak mengherankan bila banyak kalangan bersuara keras memaksa pemerintah meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam ACFTA. Pemerintah berencana akan memundurkan jadwal pelaksanaannya dari semula tahun 2010 menjadi 2018, tetapi harus dipahami bahwa kebijakan ini akan memiliki implikasi negatif bagi kredibilitas pemerintah Indonesia. Kerjasama ACFTA, tidak hanya melibatkan

dua negara, Indonesia dan China, melainkan turut melibatkan seluruh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Penundaan pelaksanaan FTA secara sepihak akan menimbulkan efek domino di mana negara-negara lain mungkin akan melakukan langkah serupa berupa penundaan penurunan tarif bea masuk. Hal ini jelas sangat berdampak buruk bagi kredibilitas pemerintah Indonesia sebagai pemimpin ASEAN periode ini.

Kajian ini mencoba menganalisis berbagai tantangan dan kesempatan yang terkait dengan pelaksanaan ACFTA bagi Indonesia. Karena ACFTA akan menghadapkan Indonesia dengan kekuatan ekonomi China yang sangat besar, maka Indonesia perlu mengidentifikasi potensi yang bisa dimanfaatkan dalam kerjasama ekonomi dalam lingkup ACFTA. Bagian selanjutnya dari kajian ini akan mengamati pola perdagangan antara Indonesia dan China. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kecenderungan arah perdagangan antar kedua negara serta indikator bagi Indonesia untuk mewaspadai kegagalan dalam pola kerjasama yang tidak seimbang.

POLA PERDAGANGAN INDONESIA-CHINA

Sinyal bahwa ACFTA berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, cukup jelas terlihat apabila kita mencermati pola perdagangan antara Indonesia dan China. Berbagai indikator mengenai pola perdagangan antara kedua negara itu menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia semakin lama semakin inferior terhadap produk-produk sejenis dari China. Secara eksplisit, hal ini tercermin dari perkembangan ekspor dan impor (Tabel 1).

Tabel 1
Neraca Perdagangan Indonesia-China, 1990-2009 (Ribu USD).

Tahun	Total Perdagangan	Ekspor	Impor	Neraca
				Perdagangan
1990	1,486,729	834,386	652,343	182,042
1995	3,236,941	1,741,718	1,495,223	246,495
2000	4,789,679	2,767,708	2,021,971	745,737
2005	12,505,216	6,662,354	5,842,863	819,491
2009	20,074,672	9,055,010	11,019,662	-1,964,652
Pertumbuhan (%)				
1990-1995	16.8	15.9	18	6.2
1995-2000	8.2	9.7	6.2	24.8
2000-2005	21.2	19.2	23.6	21.2
2005-2009	12.6	7.9	17.1	-
1990-2009	-	13.4	16	-

Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan Luar Negeri.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada periode 2005-2009, pertumbuhan ekspor Indonesia ke China (7,9% per tahun) jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor Indonesia dari China (17,1% per tahun). Bahkan pada tahun 2009, Indonesia untuk pertama kalinya mengalami defisit transaksi perdagangan bilateral dengan China sebesar hampir \$2 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan penetrasi produk China ke pasar Indonesia relatif lebih kuat dibandingkan kemampuan penetrasi produk Indonesia ke pasar China. Dalam konteks ini, pemberlakuan kerjasama perdagangan dalam ACFTA dikhawatirkan akan semakin memperkuat penetrasi produk China ke pasar Indonesia.

Kemungkinan bahwa pemberlakuan ACFTA akan mendorong semakin tingginya tingkat penetrasi produk China di pasar Indonesia. Argumentasinya, melalui ACFTA hambatan perdagangan di antara kedua negara akan semakin berkurang. Berarti kunci persaingan akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan daya saing produk yang diperdagangkan baik dalam hal kualitas, harga dan ketepatan pengiriman produk (*quality, cost, delivery*). Masalahnya, beberapa studi (lihat; Fuady 2007; Coxhead 2007; Clark dan Roy 2010) menunjukkan bahwa beberapa elemen pembentuk daya saing, seperti tingkat efisiensi, produktivitas, dan lingkungan bisnis di China relatif lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia

Adanya *gap* dalam komponen pembentuk daya saing antara Indonesia dan China membuat banyak pengamat memperkirakan bahwa ACFTA akan memberikan lebih banyak keuntungan bagi China, dan cenderung merugikan Indonesia. Dalam kaitan ini, paling tidak ada dua kerugian yang kemungkinan besar akan dialami Indonesia.

Pertama, semakin derasnya produk China yang membanjiri pasar Indonesia akan meningkatkan persaingan bisnis dan berdampak negatif terhadap kinerja dan kapasitas produksi sektor-sektor ekonomi lokal yang tidak kompetitif. Banyaknya sektor ekonomi yang tak mampu bersaing dan tutup, akan mendorong munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini akan berdampak buruk terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran. Simulasi yang pernah dilakukan P2E-LIPI (2008) menunjukkan bahwa setiap penurunan kapasitas produksi sektor industri sebesar 10% berpotensi mendorong pengangguran sebesar 500.000 orang. Dapat dibayangkan betapa besarnya pengangguran yang akan muncul seandainya ACFTA menekan kapasitas produksi sektor industri lebih dari 10%.

Kedua, semakin merajalelanya produk impor dari China akan membuat posisi neraca perdagangan Indonesia memburuk. Meskipun catatan statistik menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia terhadap China hanya mengalami defisit pada tahun 2009 (lihat Tabel 1), tetapi diperkirakan angka defisit itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Argumentasinya, sebelum tahun 2009, impor dari China yang masuk ke Kawasan Berikat (*Bonded Zones*) tidak dihitung sebagai komponen impor. Apabila angka ini dimasukkan dalam data impor BPS, maka akan diperoleh nilai impor yang jauh lebih besar.

Logikanya, apabila sebelum dilaksanakannya ACFTA di mana barang dari China dikenakan hambatan tarif, neraca perdagangan Indonesia sudah mengalami defisit, maka sangat wajar bila muncul kekhawatiran bahwa pemberlakuan ACFTA akan membuat defisit neraca perdagangan Indonesia membesar. Permasalahannya adalah, semakin melebarnya defisit dalam neraca perdagangan pada gilirannya akan mengganggu posisi neraca pembayaran (*balance of payments*). Artinya, Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak cadangan devisa (*foreign reserves*) untuk membiayai impor dari China daripada memperoleh devisa dari ekspor ke China.

Korelasi negatif di antara ACFTA dengan neraca pembayaran perlu mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah, karena hal ini bisa mengganggu stabilitas moneter. Artinya, semakin tidak imbangnya cadangan devisa yang diperoleh (dari ekspor) dengan yang dikeluarkan (untuk impor) akan menjadi problema moneter, seperti berkurangnya cadangan devisa yang kemudian bisa mempengaruhi nilai tukar dan inflasi. Apalagi fakta menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor dari China semakin lama semakin menguat. Pada periode 2003-2009, proporsi impor Indonesia dari China meningkat dari 8,8% menjadi 12,7%. Tidak mengherankan bila pada tahun 2009, China menduduki posisi kedua sebagai negara importir terbesar bagi Indonesia (Kementerian Perdagangan 2010).

Bagian selanjutnya dari kajian ini akan memaparkan struktur perdagangan antara Indonesia dan China. Produk-produk apa saja yang diimpor dan dieksport oleh Indonesia dari dan ke China

STRUKTUR PERDAGANGAN INDONESIA-CHINA

Selain pola perdagangan yang semakin tidak menguntungkan, Indonesia juga menghadapi permasalahan struktural dalam kerjasama perdagangan dengan China. Terdapat indikasi bahwa struktur perdagangan antara Indonesia dan China bersifat asimetris. Artinya, di satu sisi, struktur eksport Indonesia ke China masih sangat didominasi oleh komoditas primer, seperti minyak dan gas bumi, hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Lebih dari itu, terdapat kecenderungan bahwa produk primer dalam komposisi eksport ke China terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pangsa produk-produk pertanian terhadap total eksport ke China meningkat dari 8% pada tahun 2003 menjadi 12% pada tahun 2009. Demikian pula pangsa produk-produk pertambangan terhadap total eksport ke China juga mengalami peningkatan dari 17% pada tahun 2003 menjadi 21% pada tahun 2009 (Tabel 2). Ketergantungan Indonesia terhadap eksport sumber daya alam dengan nilai tambah rendah dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Alasannya adalah untuk memperoleh lebih banyak devisa, Indonesia harus meningkatkan laju eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya. Sedangkan hasil pengeksploitasi sumber daya alam tersebut tidak banyak yang diinvestasikan kembali untuk merawat dan mempertahankan aset

sumber daya alam yang dimiliki. Lambat atau cepat, Indonesia akan kehabisan aset sumber daya alam. Sedangkan kemampuan teknologi dan manajerial tidak banyak berubah. Hal ini merupakan fenomena yang disebut sebagai “kutukan sumber daya” (Coxhead 2007).

Thee dan Pangestu (1998) mengungkapkan bahwa Indonesia tidak berhasil dalam mengembangkan kemampuan inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh industri manufaktur untuk ”naik kelas” menjadi industri yang mapan seperti di Korea dan Taiwan. Tabel 2 memberikan semacam bukti atas kegagalan industri manufaktur dalam meningkatkan daya saing ekspor. Pangsa produk-produk industri terhadap total ekspor ke China menurun dari 49% pada tahun 2003 menjadi 42% pada tahun 2009.

Tabel 2
Struktur Perdagangan Indonesia-China, 2003-2009

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
EKSPOR (Juta USD)	3,803	4,605	6,662	8,344	9,676	10,295	9,055
Minyak dan Gas (%)	25.9	25.4	40.6	34.5	31.1	34.2	24.5
Industri (%)	49	48.8	36.9	40	40.5	38.6	42.3
Pertanian (%)	7.7	8.5	8.1	9	10.3	9.9	12.2
Pertambangan (%)	17.4	17.3	14.5	16.5	18.1	17.2	21.1
IMPOR (Juta USD)	2,958	4,101	5,843	6,637	8,558	13,108	11,020
Minyak dan Gas (%)	21	18.1	22.1	17.1	7	1.8	2.4
Industri (%)	63.8	66.2	63.5	67.2	75.9	79.6	80.1
Pertanian (%)	11.6	15.5	13.8	15.4	16.5	18	17.2
Pertambangan (%)	3.6	0.2	0.6	0.2	0.6	0.6	0.2

Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan Luar Negeri.

Di sisi lain, struktur impor Indonesia dari China lebih banyak didominasi oleh produk-produk industri pengolahan dengan proporsi yang cenderung terus meningkat. Pangsa produk-produk industri terhadap total impor dari China mengalami peningkatan pesat dari 64% pada tahun 2003 menjadi 80% pada tahun 2009 (Tabel 2). Paling tidak ada dua permasalahan yang muncul dari tidak simetrisnya struktur perdagangan antara Indonesia dan China. *Pertama*, produk primer memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan produk industri pengolahan. Artinya perdagangan antara Indonesia dan China menciptakan *term*

of trade yang tidak terlalu menguntungkan Indonesia (Coxhead 2007; Adam 2010).

Kedua, karena mengandalkan produk primer sebagai komoditas ekspor, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proses nilai tambah. Ketergantungan yang terlalu besar pada ekspor produk primer juga bisa menjadi bumerang bagi perkembangan industri manufaktur. Ini terjadi tidak saja karena produsen barang primer lebih suka memasarkan produknya ke China sehingga membuat industri nasional sering kesulitan pasokan input yang dibutuhkan (seperti *crude palm oil/CPO*, gas, dan batubara) untuk menjalankan proses produksi. Selain itu, karena barang primer yang diekspor ke China digunakan untuk menghasilkan beragam produk industri yang nantinya dipasarkan kembali ke Indonesia, maka China memperoleh nilai tambah yang lebih besar dalam perdagangan dengan Indonesia.

Terlepas dari permasalahan di atas, data mengenai struktur perdagangan antara Indonesia dan China sebagaimana tersaji pada Tabel 2 memberikan sinyalemen kuat bahwa sektor industri manufaktur akan menerima dampak paling signifikan dari pemberlakuan ACFTA. Memang, Indonesia mengimpor berbagai macam barang industri dari China mulai dari tekstil sampai dengan besi-baja (Tabel 3).

Tabel 3 menunjukkan bahwa China memiliki keunggulan kompetitif terutama untuk kelompok produk-produk besi dan baja, petrokimia hulu, mesin industri, kendaraan bermotor dan tekstil. Produk-produk tersebut merupakan pesaing berat bagi industri lokal. Hal ini disebabkan karena impor produk-produk tersebut meningkat pesat terutama setelah bea masuk untuk produk tersebut dihilangkan/diturunkan dengan adanya perjanjian ACFTA.

Tabel 3
Beberapa Barang Industri Impor Utama dari China, Pada Tahun 2008

Barang Impor	Proporsi terhadap Total Impor (%)
Tekstil	0.56
Besi dan baja	1.84
Ban	0.37
Mebel	0.12
Pengolahan kakao	0.17
Industri alat kesehatan	0.24
Kosmetik	0.09
Aluminium	0.18
Elektronika	0.49
Petrokimia hulu	1.08
Kaca lembaran	0.14
Sepatu	0.47
Mesin industri	0.83
Alat kantor	0.13
Kendaraan bermotor	0.57
Total Impor (Juta USD)	13,108

Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan Luar Negeri.

Tanpa adanya upaya yang serius untuk menata ulang industri nasional, dikhawatirkan bahwa industri nasional akan semakin terpuruk dalam persaingan global yang semakin ketat. Bukan tidak mungkin indikasi awal deindustrialisasi (penurunan kontribusi sektor industri dalam menciptakan *output* dan menyediakan kesempatan kerja), akan semakin menguat seiring dengan pemberlakuan ACFTA. Artinya, industri nasional akan menjadi korban karena ketidaksiapan dalam menghadapi tekanan perdagangan dengan China.

Ada beberapa pertimbangan yang bisa memperkuat kekhawatiran bahwa produk-produk industri nasional akan sulit bersaing dengan produk industri dari China. *Pertama*, dalam kurun waktu 1996 hingga 2006, indeks kemiripan (*similarity index*) dari produk-produk ekspor industri nasional dengan produk ekspor industri China mengalami peningkatan dari 58,9% (1996) menjadi hampir 62% (2006) (Fuady 2007). Hal ini berarti bahwa struktur perdagangan antara kedua negara cenderung bersifat substitusi daripada komplementer. Akibatnya, pemberlakuan ACFTA akan membuat produk industri nasional harus bersaing ketat dengan produk serupa dari China.

Kedua, dengan menggunakan *rasio output* terhadap tenaga kerja sebagai indikator produktivitas, Chai (2010) menunjukkan bahwa gap produktivitas tenaga kerja Indonesia dengan produktivitas tenaga kerja China cenderung semakin melebar. Pada tahun 1996, produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah 70,1% dari produktivitas tenaga kerja China, sedangkan pada tahun 2008 menurun menjadi hanya 65,4%.

Ketiga, dibandingkan dengan pemerintah Indonesia, pemerintah China memiliki rencana aksi (*action plan*) yang jelas dalam mendukung sektor industrinya. Misalnya, pemerintah China menyediakan dana yang cukup besar untuk membantu industri andalan eksportnya, seperti industri TPT, untuk melakukan restrukturisasi permesinan. Tidak mengherankan bahwa permesinan yang digunakan industri China sangat efisien dengan produktivitas yang tinggi. Permesinan yang digunakan industri TPT China mampu menghemat energi 17% lebih rendah dari permesinan yang digunakan industri TPT Indonesia (Chongbo 2005; Soesastro dan Basri 2005).

Keempat, pemerintah China juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menciptakan lingkungan yang pro-bisnis. Pemerintah Negeri Tirai Bambu ini secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi makro, melakukan reformasi birokrasi, menegakkan kepastian hukum (*law enforcement*), dan menata-ulang sistem hukum yang transparan serta *accountable* (Clark dan Roy 2010). Dalam kaitan dengan sistem hukum, berbeda dengan di China, sistem hukum di Indonesia sangat kompleks dan berbelit-belit (World Bank 2004). Sistem hukum yang demikian membuat pengusaha harus mengalokasikan waktu dan biaya dalam proporsi yang cukup signifikan pada saat mereka harus berhubungan dengan peraturan hukum. Misalnya, hasil penelitian World Bank (2004) mengungkapkan bahwa perusahaan mengalokasikan 10% dari waktunya setiap minggu khusus untuk mengisi *form* regulasi, di mana 60% dari waktu itu digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Perda. Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa 29% dari 900 perusahaan yang dijadikan responden mengaku mempekerjakan konsultan khusus untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaian dengan regulasi.

Sebagian birokrat nakal mengambil keuntungan dari kompleksitas dan berbelit-belitnya peraturan yang ada. Para birokrat nakal mempersulit perizinan pendirian usaha ataupun izin untuk melakukan ekspor-

impor. Misalnya, beberapa orang pengusaha di Bandung mengaku bahwa mereka membutuhkan waktu rata-rata sekitar 6 bulan untuk mendapatkan sertifikat yang memberikan izin untuk melakukan ekspor-impor (Adam 2008).

Lebih dari itu, untuk menciptakan lingkungan yang pro bisnis, pemerintah China mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membangun dan menjaga kualitas infrastruktur. Dalam sepuluh tahun terakhir, rasio anggaran infrastruktur terhadap PDB China rata-rata berada pada kisaran 7,5-10% (Ke 2010).

Tidak seperti di China, anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintah Indonesia relatif sangat kecil. Selain itu, dalam sepuluh tahun terakhir, rasio anggaran infrastruktur terhadap PDB Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari 3.7% (1999), 3.6% (2003), 2.9% (2008), hingga hanya 1.5% (2009) (Adam 2010). Tidak mengherankan apabila beberapa studi menyimpulkan bahwa infrastruktur menjadi salah satu kendala serius yang dihadapi sektor industri untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saingnya. Misalnya, studi World Bank (2005) menunjukkan bahwa 900 perusahaan industri yang disurvei mengaku kehilangan 4% dan 6% dari total penjualan mereka karena kondisi infrastruktur transportasi dan energi yang buruk.

Kelima, beberapa BUMN yang menguasai industri hulu, seperti Pertamina dan PLN, tidak beroperasi secara efisien. BUMN yang tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik menjadi tidak efisien. Ketidakefisienan ini selanjutnya dibebankan kepada industri nasional dengan pelayanan yang buruk dan penetapan harga jual yang tidak sesuai dengan produk/jasa yang dihasilkannya kepada industri nasional. Akibatnya, industri manufaktur terpuruk karena krisis energi dan listrik. Seringkali pengusaha harus membayar mahal kepada PLN untuk memperoleh pasokan listrik yang memadai.

Keenam, otoritas moneter di China mampu mendorong sektor perbankan bekerja secara efisien sehingga mampu menyediakan fasilitas kredit murah bagi industri. Suku bunga kredit yang ditawarkan perbankan China berkisar antara 5-6%, jauh lebih rendah dibandingkan bunga kredit investasi dan modal kerja yang ditawarkan perbankan Indonesia, yang mencapai 13-14% (Clark and Roy 2010). Tingginya suku bunga kredit yang harus dihadapi perusahaan di Indonesia menyebabkan

mereka mengeluarkan biaya modal 8% lebih tinggi dari biaya modal yang harus dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan China.

Ketujuh, perkembangan sosial-politik, terutama setelah diberlakukannya OTDA (Otonomi Daerah) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Dearah) turut berkontribusi terhadap pelemahan daya saing sektor industri. Dengan kewenangan yang dimilikinya, seorang kepala daerah bisa menerbitkan beragam perda (peraturan daerah), seperti retribusi, izin usaha, dan lokasi industri. Menurut beberapa hasil studi (lihat Brodjonegoro 2004; Adam 2008) terungkap bahwa banyak perda yang ternyata tumpang tindih (*overlapping*) dengan peraturan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Bahkan seringkali perda-perda tersebut memiliki logika ekonomi yang kurang masuk akal karena semata-mata diorientasikan untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah). Karena itu, perda-perda yang demikian justru menambah biaya usaha yang tidak semestinya (*unnecessary cost of doing business*) di Indonesia.

Harus diakui, pemerintah pusat telah melakukan penilaian (*regulatory impact assessment*) dan kemudian mendiskualifikasi serta membatalkan ribuan perda yang dianggap tidak *business friendly*. Namun demikian, sosialisasi dan *monitoring* yang lemah membuat perda-perda yang telah dicabut pemerintah pusat tetap bisa diberlakukan oleh pemerintah daerah (Adam 2008).

PELUANG BAGI INDONESIA

Mencermati pola dan struktur perdagangan antara Indonesia dan China, nampaknya Indonesia akan sangat tergantung pada ekspor komoditas primer, seperti hasil pertanian, perkebunan dan pertambangan. Sektor pertanian tampaknya berpeluang mendapatkan manfaat dari pemberlakuan ACFTA. Ekspor produk-produk pertanian ke China diperkirakan akan mengalami peningkatan, sehingga kontribusi sektor pertanian dalam total penerimaan ekspor meningkat dengan signifikan. Selain itu, neraca perdagangan sektor pertanian Indonesia terhadap China menunjukkan posisi yang selalu surplus.

Namun demikian, penting untuk dikemukakan, bahwa dalam sektor pertanian itu sendiri, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, karet dan kopi mendominasi struktur ekspor sektor pertanian

Indonesia. Produk-produk ini dieksport dalam bentuk bahan mentah dan kemudian diproses menjadi produk jadi/setengah jadi di China. Dalam hal ini, Indonesia memperoleh nilai tambah yang relatif rendah dibandingkan China yang mampu memproses bahan mentah menjadi barang jadi. Indonesia juga kehilangan kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari proses produksi bahan mentah menjadi bahan jadi/setengah jadi. Di samping itu, produk hortikultura, bawang putih, dan buah-buahan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia banyak yang diimpor dari China.

Tabel 4
Beberapa Barang Industri Impor Utama dari China, 2008

SITC	Komoditas	Pertumbuhan (%)
42241000	Minyak inti sawit	45,49
42249000	Minyak inti sawit lainnya	42,32
62119990	Karet campuran lainnya	40,37
23125110	SIR 3 CV	36,43
23211910	Karet-polybutadiene-styrene (SBR)	36,23
23121100	Karet lembaran	35,09
9109910	Other edible mixture of veg origin	32,74
42231000	Minyak kopra	32,30
23125160	Karet SIR 20	25,21
42229000	Minyak sawit lainnya	20,87
23211110	Polybutadienen-styrene latex	18,43
7210000	Biji coklat, pecah dan setengah pecah, mentah, roated	18,49
9101900	Margarine curah	18,18
5481100	Gaplek iris dan kering (manioc)	18,14
42221000	Minyak sawit	18,11

Sumber: P2E-LIPI, Hubungan Kerjasama Ekonomi Antar Negara di Kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan analisis pertumbuhan produk yang diperdagangkan, studi yang dilakukan oleh P2E LIPI (Purwanto 2008) menunjukkan terdapat 15 jenis komoditas pertanian yang berpotensi mendapatkan manfaat dari pemberlakuan ACFTA (Tabel 4). Ekspor 15 komoditas tersebut ke China memiliki tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan, baik dengan ekspor seluruh produk, maupun dengan ekspor produk pertanian. Seiring dengan pemberlakuan ACFTA, 15 komoditas pertanian itu diperkirakan akan mengalami peningkatan kemampuan penetrasi ke pasar China.

Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ekspor produk pertanian yang masih terkategori sebagai komoditas primer hanya memberikan manfaat yang terbatas, bahkan dapat merugikan

industri manufaktur secara keseluruhan. Sejak tahun 2000, terjadi kenaikan harga-harga komoditas di pasar internasional. Seiring dengan kenaikan harga komoditas, sektor perkebunan (terutama sawit) dan pertambangan (terutama batu bara) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Sektor ini kemudian menjadi penghasil devisa ekspor yang terbesar menggantikan ekspor industri padat karya seperti tekstil, garmen dan alas kaki. Basri dan Rahardja (2010) mengatakan bahwa konsentrasi ekspor komoditas primer yang tinggi terutama saat periode *booming* komoditas menyebabkan peningkatan *terms of trade* yang selanjutnya mendorong apresiasi nilai tukar. Apresiasi nilai tukar berikutnya akan menekan daya saing produk ekspor manufaktur sehingga muncul fenomena penyakit Belanda (*Dutch Disease*)¹.

Selain menekan perkembangan industri manufaktur, ekspor komoditas primer juga berpotensi mengurangi kesempatan untuk meraih keuntungan dari proses nilai tambah. Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi jika komoditas pertaniannya diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor ke China atau ke negara-negara lain. Proses penambahan nilai tambah ini juga dapat mendorong pengembangan kapasitas inovasi yang sangat dibutuhkan bagi industri manufaktur (Thee dan Pangestu 1998). Dalam konteks ini, komitmen pemerintah untuk mengubah strategi hubungan dagang dengan China melalui upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan komoditas pertanian akan memberikan manfaat yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.

Tabel 5 memberikan sebuah gambaran nyata di mana kekuatan ekspor manufaktur Indonesia semakin terpuruk setelah krisis finansial Asia 1997-1998. Pertumbuhan ekspor manufaktur Indonesia menyamai pertumbuhan ekspor manufaktur China selama periode sebelum krisis finansial Asia. Tetapi setelah melewati periode krisis, pertumbuhan ekspor manufaktur Indonesia tersendat bahkan tertinggal jauh dari China. Selama periode 2003-2007, pertumbuhan ekspor manufaktur Indonesia hanya mencapai 6,4%, sedangkan dalam periode yang sama, China mencetak angka pertumbuhan yang fantastis sebesar 27,6%. Pertumbuhan ekspor manufaktur Indonesia jelas cukup tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya kecuali Filipina.

¹ Lihat Warr (1992) tentang istilah Dutch Disease yang dipakai untuk menjelaskan situasi yang dialami Indonesia selama dekade 1970-an, dimana ekspor minyak bumi merupakan primadona.

Tabel 5
Pertumbuhan Ekspor Manufaktur Beberapa Negara

	1991-1996	1997-2002	2003-2007
Indonesia	16.5%	3.4%	6.4%
Brazil	5.2%	2.4%	16.3%
China	16.9%	13.3%	27.6%
India	8.7%	5.8%	17.3%
Korea	9.0%	3.2%	14.3%
Malaysia	22.0%	2.7%	7.9%
Philippines	40.7%	10.7%	3.4%
Thailand	16.0%	2.7%	14.6%
Vietnam	--	13.6%	21.3%

Sumber: Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School, hal. 17.

Basri dan Rahardja (2010) mengungkapkan bahwa kenaikan ekspor komoditas primer seperti minyak sawit dan batubara, karena dorongan kenaikan harga komoditas internasional telah menekan kinerja ekspor manufaktur seperti tekstil-garmen dan produk-produk elektronik. Kenaikan ekspor komoditas primer ini juga tidak mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas teknologi industri manufaktur. Oleh sebab itu, pemerintah harus secara jeli mengelola ekspor komoditas primer agar tidak seluruh pasokan komoditas yang ada kemudian diekspor tetapi perlu memikirkan kebutuhan *input* industri lokal. Tentunya, keuntungan dari ekspor komoditas primer tersebut juga harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri manufaktur.

Ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer hanyalah salah satu faktor yang menghambat kinerja ekspor manufaktur. Sesungguhnya masih banyak faktor-faktor lainnya yang turut menekan daya saing industri manufaktur Indonesia. Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan memaparkan berbagai faktor penghambat daya saing tersebut beserta agenda untuk mengatasinya.

AGENDA PENINGKATAN DAYA SAING

Perubahan pola produksi global menuntut para pelaku bisnis dan industri di Indonesia untuk beradaptasi. Feenstra (1998) menjelaskan bahwa dunia menghadapi fenomena baru di mana perusahaan-perusahaan

multinasional (MNCs) melakukan relokasi fasilitas-fasilitas produksi mereka. Pola produksi terpusat di satu negara bukan menjadi hal yang optimal dalam perhitungan bisnis mereka. Untuk memperbesar profit, mereka melakukan pola *outsourcing*, di mana mereka mengontrak perusahaan lain untuk melakukan satu kegiatan produksi yang bukan merupakan prioritas unit usaha mereka. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar multinasional juga menjalankan pola modularitas, di mana mereka menggunakan sistem modul dalam setiap jenjang produksi. Contohnya perusahaan "Apple" yang menghasilkan produk IPOD. Perusahaan induk di AS mendesain produk dan *software*. Modul *hard drive*-nya diproduksi di China oleh sebuah perusahaan Jepang. Demikian pula dengan modul *display*-nya diproduksi oleh perusahaan Jepang. Komponen *microchip* yang mengendalikan fungsi-fungsi IPOD diproduksi di Taiwan. Sedangkan multimedia prosesornya diproduksi di Taiwan dan Singapura. Ratusan komponen lainnya diproduksi di berbagai negara seperti Jepang, Korea dan China. Perakitan akhir dilakukan di China oleh sebuah perusahaan Taiwan (Rajawali Foundation and Harvard Kennedy School 2010).

Saat ini, Indonesia belum mampu melibatkan diri secara penuh dalam pola produksi global yang bercirikan *outsourcing* dan spesialisasi vertikal (Aswicahyono, Narjoko dan Hill 2008; Basri dan Rahardja 2010). Akibatnya, kinerja ekspor manufaktur Indonesia menjadi relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang aktif terlibat dalam jaringan produksi global ini. Berbagai permasalahan klasik masih membebani perekonomian dan kinerja sektor industri manufaktur. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard Kennedy School Indonesia Program (2010) menunjukkan bahwa Indonesia belum berhasil mengatasi masalah kekurangan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh industri seperti ketersediaan pasokan listrik dan energi, sarana transportasi yang efisien dan dukungan sektor logistik dan transportasi yang optimal. Sebagai negara kepulauan, Indonesia belum mampu mengembangkan kapasitas pelabuhan yang dimiliki untuk mendukung perekonomian daerah maupun nasional. Indonesia masih mengandalkan pelabuhan Singapura dan Malaysia untuk mengirim barang baik di dalam wilayah Indonesia maupun ke luar negeri.

Hasil studi LPEM (2005) menunjukkan biaya logistik di Indonesia mencapai 14% dari total biaya produksi. Angka ini sangat tinggi

apabila dibandingkan dengan *best practice* seperti di Jepang yang hanya 4,9%. Ketidakefisienan kinerja pelabuhan-pelabuhan nasional mengakibatkan biaya transportasi menjadi relatif mahal. Hal ini menjadi penghambat bagi industri yang berorientasi ekspor. Industri-industri ini akan kesulitan dalam menghadapi tuntutan pasar internasional yang mementingkan biaya yang murah dan ketepatan dalam waktu pengiriman. Dalam hal ini, ke depan Indonesia perlu membangun infrastruktur pelabuhan dan transportasi yang lebih handal dalam rangka menekan biaya perdagangan. Selain itu, sarana transportasi laut memainkan peranan yang vital dalam negara kepulauan seperti Indonesia. Sayangnya Indonesia belum mampu menjadi pemain utama bahkan dalam hal pelayaran domestik. Untuk mengirimkan barang dari pulau Jawa ke Papua misalnya, Indonesia masih sangat tergantung pada pelayaran asing melalui Singapura.

Hambatan infrastruktur ini juga menjadi kendala mengapa tidak banyak penanaman modal asing (PMA) yang memilih Indonesia sebagai basis kegiatan usaha. Investasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Target investasi pemerintah dalam RPJMN 2011-2014 sebesar Rp 10.000 triliun dalam lima tahun tidaklah mudah untuk dicapai dengan situasi infrastruktur seperti saat ini. Diperlukan tambahan investasi untuk infrastruktur sebesar Rp. 2.000 triliun dalam lima tahun (2011-2014) untuk menambah kapasitas pembangkit listrik, pembangunan sarana jalan/jembatan, pembangunan sarana tranportasi antar pulau, perbaikan sarana pelabuhan, pembangunan kereta api, dan sebagainya. Indonesia perlu berpikir kreatif dan strategis dalam mencari sumber-sumber pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Selain itu, pemerintah pusat perlu lebih berani memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk membangun infrastruktur. Sambodo (2007) mengemukakan bahwa di beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Banten, terdapat kesan bahwa pemerintah pusat belum sepenuh hati memberikan kewenangannya kepada kedua pemerintah daerah itu untuk membangun infrastruktur berkelas internasional. Ini terindikasi cukup jelas dari tidak adanya sinyal positif dari pemerintah pusat untuk mengijinkan kedua pemerintah daerah itu mengundang keterlibatan investor asing, meskipun beberapa investor asing menunjukkan minat, keseriusan, dan telah melakukan pembicaraan yang intensif dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur di kedua daerah itu.

Dalam kaitannya dengan pasokan energi, pemerintah juga perlu menata ulang kebijakannya agar lebih rasional. Keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi terhadap PLN perlu dibarengi dengan kesempatan bagi PLN untuk menaikkan harga listrik mendekati harga ke-ekonomiannya. PLN mengalami kesulitan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik bahkan untuk memelihara kapasitas yang ada sekalipun. Dalam hal ini PLN perlu memperbaiki manajemen perusahaan agar semakin efisien dan transparan.

Hal lain yang perlu ditinjau kembali adalah pengenaan pajak atas generator pembangkit listrik (genset) yang berbahan baku batubara. Hal ini merupakan contoh kurang rasionalnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi terbatasnya pasokan energi. Di tengah keterbatasan pasokan energi, pemerintah seharusnya memberikan insentif pada perusahaan yang ingin membangun genset berbahan bakar batubara. Namun demikian, tentu saja pemerintah perlu mengawasi secara ketat fenomena ini sehingga langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk membangun genset berbahan bakar batubara tidak membahayakan lingkungan sekitar (Adam 2008).

Di samping hambatan dalam ketersediaan infrastruktur, Indonesia juga masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. Indonesia masih sangat tergantung pada industri yang memanfaatkan tenaga kerja dengan upah murah. Akibatnya jenis industri yang bersifat padat teknologi, padat pengetahuan, inovasi dan kreativitas menjadi kurang berkembang. Anggaran yang dikeluarkan oleh industri terkait dengan penelitian dan pengembangan baik untuk produk maupun proses masih sangat rendah. Untuk dapat terlibat dalam jaringan produksi global produk-produk berteknologi tinggi, seperti IPOD, Indonesia membutuhkan tenaga-tenaga professional yang terdidik dan terlatih dengan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan yang memadai.

Pelibatan asosiasi bisa dijadikan salah satu solusi dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selama ini, peran asosiasi tampaknya belum banyak dilibatkan di dalam membangun tenaga kerja berkualitas. Padahal, beberapa asosiasi, seperti asosiasi produsen optik, tekstil, pulp dan kertas telah berupaya membangun dan mengembangkan program-program pendidikan (D3) dan lulusan dari program pendidikan beberapa asosiasi telah banyak bekerja di luar negeri (Sambodo 2007)

Hambatan lain yang perlu mendapat respon serius dari pemerintah adalah kinerja birokrasi yang tidak efisien. Birokrasi sering kali menjadi faktor penghambat kelancaran proses perdagangan. Program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Masih banyak keluhan dari kalangan usaha dan investor mengenai kinerja aparat birokrasi yang lamban dan tidak sesuai dengan tugas pokok mereka. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan regulasi dan lemahnya upaya penegakan hukum. Hal-hal klasik yang tidak juga berhasil dibenahi oleh pemerintah hingga saat ini.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih serius untuk meningkatkan profesionalisme birokrat, khususnya di instansi yang akan mempengaruhi secara langsung dengan aktivitas produksi dan perdagangan luar negeri. Upaya melakukan audit kinerja bekerjasama dengan lembaga independen perlu dilakukan tidak saja untuk meningkatkan sisi pelayanan, tetapi juga mengasah *sense of urgency* birokrat agar dapat dengan cepat beradaptasi dan merespon dinamika perdagangan internasional.

Lebih dari itu, pemerintah perlu secara intensif melakukan penilaian terhadap berbagai peraturan yang terkait dengan perdagangan dan industri (*regulatory impact assessment*). Hal ini penting untuk mengeliminasi peraturan (pusat dan daerah) yang bersifat kontra produktif dalam meningkatkan lingkungan bisnis yang kondusif. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu melengkapi diri dengan memberikan sanksi administrasi untuk mencegah pemerintah daerah yang masih memberlakukan perda yang sebenarnya telah didiskualifikasi dan dicabut oleh pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Indonesia dapat memanfaatkan peluang dari implementasi perjanjian perdagangan ACFTA, tetapi untuk itu dibutuhkan upaya-upaya serius guna membenahi daya saing perekonomian secara umum maupun dari sektor industri secara khusus. Kondisi yang memadai bagi industri untuk tumbuh dan berkembang harus dapat diciptakan, antara lain dengan menyediakan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu berbagai keluhan para pelaku usaha juga perlu mendapat tanggapan berupa aksi nyata dari pengambil kebijakan. Masalah ketidakpastian hukum,

hambatan birokrasi dan korupsi merupakan masalah klasik yang belum juga mampu diselesaikan oleh pemerintah. Menghadapi tantangan China yang begitu berat, sangat mustahil Indonesia dapat memainkan peran yang optimal dalam kerjasama perdagangan apabila kondisi iklim usaha tidak kondusif.

Langkah pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif ACFTA misalnya dengan penundaan penerapan kebijakan ACFTA terhadap beberapa pos tarif harus dibarengi dengan upaya nyata memperkuat industri lokal. Harus dipahami bahwa ACFTA tidak hanya melibatkan Indonesia dengan China, tetapi juga negara-negara anggota ASEAN lainnya. Upaya penundaan penerapan kebijakan ACFTA sedikit banyak akan memengaruhi kredibilitas pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu secara cermat memperhitungkan sektor-sektor apa saja yang layak untuk memperoleh penundaan dan berapa lama waktu yang diberikan untuk mempersiapkan diri.

Ke depan, Indonesia perlu berpikir secara strategis bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi China yang sangat besar. Kebijakan proteksionisme untuk menekan impor dari China tidak akan efektif bahkan bisa menjadi bumerang bagi perekonomian nasional. Sebaliknya, Indonesia perlu secara jeli melihat pasar China dan mencari cara untuk melakukan penetrasi, misalnya dengan meningkatkan aktivitas promosi dan pameran perdagangan di China. Minat investor China yang sangat besar untuk menanamkan modal di bidang infrastruktur perlu ditanggapi secara positif. Rencana investasi China dalam sektor infrastruktur perlu diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarpulau di Indonesia. Konektivitas akan menjadi kunci bagi pendistribusian hasil-hasil pembangunan yang lebih merata sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang terpenting, hal Indonesia perlu memikirkan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan manfaat jangka panjang. Jangan sampai Indonesia hanya menambah ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan melupakan pentingnya pengembangan kapasitas industri pengolahan secara keseluruhan.

Terakhir, tim khusus untuk menanggulangi dampak ACFTA yang telah dibentuk oleh pemerintah perlu bekerja keras untuk memberikan strategi yang efektif guna memperkuat daya tahan perekonomian nasional. Tim

ini harus bisa memainkan perannya yang strategis dalam memperbaiki koordinasi antar berbagai kementerian yang terkait. Koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga yang terkait dengan perdagangan, industri, perhubungan dan sebagainya merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Adam, Latif. 2008. “Prasyarat Dasar”, dalam Sambodo, Maxensius Tri (ed.), *Model dan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Nasional*, Jakarta: LIPI Press, hal. 47-66.
- Clark, Colin dan Roy, Kartik. 2010. *Comparing Development Pattern in Asia*, Lynne Rienner, Colorado.
- Coxhead, Ian. 2007. “A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia,” *World Development*, 35:7, hal. 1099-1119.
- Fuady, Ahmad Helmy. (2007. “Ancaman Daya Saing: Pelajaran dari China” dalam Sambodo, M.T. (ed.) *Mengurai Benang Kusut Daya Saing*, Jakarta: LIPI Press, hal. 17-42.
- Warr, P. G. 1992 ‘Exchange Rate Policy, Petroleum Prices, and the Balance of Payments’ dalam A. Booth (ed.) *The Oil Boom and After: Indonesian Economic Policy and Performance in the Soeharto Era*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, hal. 132-156.
- Purwanto. 2008. “Integrasi Ekonomi China-ASEAN (CAFTA)” dalam Yaumidin, Umi Karomah (ed.) *Hubungan Kerjasama Ekonomi Antar Negara di Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta: P2E-LIPI, hal. 77-114.
- Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School Indonesia Program. 2010. *From Reformasi to Institutional Transformation: A Strategic Assessment of Indonesia’s Prospects for Growth, Equity and Democratic Governance*, ASH Center for Democratic Governance and Innovation.
- Sambodo, Maxensius Tri. 2007. ”Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Nasional” dalam Sambodo, Maxensius Tri (ed.) *Mengurai Benang Kusut Daya Saing Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, hal. 173-177.
- Thee Kian Wie dan Pangestu, Mari. 1998. ‘Technological capabilities and Indonesia’s manufactured exports’, in *Technological Capabilities and Export Success in Asia*, eds Dieter Ernst, Lynn Mytelka dan Tom Ganiatsos, Routledge, London and New York, hal. 211–65.

Jurnal

- Adam, Latif. 2010. "ACFTA Dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China", *Inspirasi*, Vol. 2 No. 2, hal 8-9.
- Athukoralra, Prema-chandra. 2006. "Post-Crisis Export Performance: The Indonesian Experience in Regional Perspective," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 42:2, hal.177-211.
- Athukoralra, Prema Chandra. 2008. "China's Integration into Global Production Networks and its Implications for Export-led Growth Strategy in Other Countries in the Region," Working Papers in Trade and Development, No. 2008/04, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, April.
- Chongbo, William. 2005. "Indonesia Textile and Garment Industry: Challenges and Prospects", *Indonesian Quarterly*, Vol. 33 No. 3, hal. 208-215.
- Feenstra, Robert C. 1998 "Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy," *The Journal of Economic Perspectives*, 12:4, hal. 31-50.
- Ke, Shanzi. 2010. "Determinants of Economic Growth and Spread-backwash Effects in Western and Estern China" *Asian Economic Journal*, Vol. 24 No. 2, hal. 179-202.
- Soesastro, Hadi dan Basri, Mochamad Chatib. 2005. "The Political Economy of Trade Policy in Indonesia" *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 22 No. 1, hal. 3-18.
- Thee Kian Wie dan Negara, S. D. 2010. 'Survey of Recent Developments', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 46, No. 3, hal. 279–308.

Laporan

- Asian Development Bank. 2009a. *Asian Development Outlook 2009 Update: Broadening Openness for a Resilient Asia*, Manila, Agustus.
- Asian Development Bank. 2009b. *Key Indicators for Asia and the Pacific*, Manila, Agustus.
- LPEM-FEUI. 2005. 'Inefficiency in the Logistics of Export Industries: The Case of Indonesia', Laporan hasil kerjasama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Jakarta.
- World Bank. 2004. *Raising Investment in Indonesia a Second Generation of Reforms*, Washington D.C.
- World Bank. 2009. *Doing Business 2010*. Washington, D.C.
- World Economic Forum. 2009. *Global Competitiveness Report, 2009-2010*, Geneva, September.

Makalah

- Basri, Muhammad Chatib dan Rahardja, Sjamsu. 2010. *Managing openness: should Indonesia say good bye to strategy facilitating exports*, makalah untuk the International Trade Department, World Bank, Washington DC.
- Chai, Joseph. 2010. "Labor Productivity in East Asian Countries" *Working Paper No. 58*, School of Economics, the University of Queensland, Brisbane.
- Clark, Colin dan Roy, Kartik. 2010. *Comparing Development Pattern in Asia*, Lynne Rienner, Colorado.
- Haryo Aswicahyono, Dionisius Narjoko dan Hal Hill. 2008. "Industrialization After a Deep Economic Crisis: Indonesia," Canberra: Australian National University, Research School of Pacific and Asian Studies, Working Papers in Trade and Development, Working Paper No. 2008/18, Agustus.
- P2E-LIPI. 2008. "Pertumbuhan Ekonomi Naik, Industri Stagnan: Mencari Terobosan Kebijakan Industri", *Press Release*, P2E LIPI, Jakarta.

Website

- Kementerian Perdagangan. 2010. *Satistik Neraca Perdagangan dengan Mitra Dagang*, http://www.kemendag.go.id/statistik_neraca_perdagangan_dengan_negara_mitra_dagang/, 3 Januari 2011.